



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SANTOSO TRI HANANTO**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **263395**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/163 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah Seluas 2570 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 68 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 280.250.000

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOBIL, KIA RIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. LAINNYA, ---(SEPEDA) SEPEDA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 250.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 80.500.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 263.938.984



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.874.688.984
III. HUTANG	Rp.	175.764.576
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.698.924.408

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.